

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Andrisman, Tri. 2009. *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Universitas Lampung.
- Ali, Mahrus. 2013. *Asas, Teori dan Praktek Hukum Pidana Korupsi*. Yogyakarta: UII Press.
- Ali, Zainuddin. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Chawazi, Adami. 2005. *Hukum Pidana formil dan materiil Korupsi di Indonesia*. Malang : Bayu Media.
- , 2007. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta : PT. Raja Grafindo.
- , 2016. *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Danil, Elwi. 2011. *Korupsi Konsep Tindak Pidana dan Pemberantasannya*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Gunadi Ismu dan Efendi Joenadi. 2014. *Hukum Pidana*. Jakarta : Kencana.
- Hamzah, Andy. 2007. *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada.
- Irawan, Iwan. 2020. *Sila Sila Pancasila Terhadap Tindakan Korupsi*. Binus University.
- J.C.T Simorangkir. 2006. *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- J. Supranto. 2003. *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Mahmodin, Mahfud. 2020. *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Yogyakarta: Gama Media.
- Mertokusumo, Sudikno. 1999. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta : Liberty
- Nazir, Risman Sikumbang. 2013. *Metode Penelitian*. Bogor : Ghalia Indonesia.
- R. Wiyono. 2005. *Pembahasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.

Setiadi, Wicipto. 2018. *KORUPSI DI INDONESIA (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi)*. Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jakarta.

Soekanto, Soerjono. 2009. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Syamsuddin, Aziz. 2011. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta : Sinar Grafika.

Zurnetti, Aria. 2020. *Kedudukan Hukum Pidana Adat Dalam Penegakan Hukum dan Relevansinya Dengan Pembaruan Hukum Pidana Nasional*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076, yang berbunyi : “Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila”.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

C. JURNAL DAN LAIN LAIN

Johan Dwi, Junianto. 2019. *Obstruction of Justice dalam Pasal 21 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Media Iuris Vol. 2 No. 3.

- Kadek Indah, Bijayanti dan A.A Ngurah, Oka Yudistira Darmadi. 2020. *Pertanggungjawaban Pidana Advokat pada Obstruction of justice dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Kertha Wicara.
- Mansyah, Muh Sutri dan La Ode Bunga Ali. 2019. *Menghilangkan Alat Bukti oleh Penyidik Tindak Pidana Korupsi sebagai Upaya Obstruction of justice*. Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan.
- Markhy S, Gareda. 2015. *Perbuatan Menghalangi Proses Peradilan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pasal 21 UU No 31 Tahun 1999 juncto UU No 20 Tahun 2001*. Jurnal Lex Crimen.
- Marshanda, dkk. 2023. *RATIO DECIDENDI HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA BEBAS PELAKU OBSTRUCTION OF JUSTICE PADA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan MA Nomor 78 PK/Pid.Sus/2021)*. Undergraduate thesis. Sriwijaya University.
- Ramadhini, Airen Priska. 2018. *Tinjauan Yuridis terhadap Perbuatan yang Menghalangi Proses Peradilan (Obstruction of Justice) dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Undergraduate thesis. Universitas Internasional Batam.
- Shinta Agustina, Dkk. 2015. *Obstruction Of Justice : Tindak Pidana Menghalangi Proses Hukum Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi*. Themis Book.
- Tjoneng, A., Christin Septina Basani, & Sidabutar. 2020. *MENGUJI KEWENANGAN DEWAN PENGAWAS KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM PEMBERIAN IZIN PENGGELEDAHAN SEBAGAI TINDAKAN MERINTANGI PROSES PENYIDIKAN (OBSTRUCTION OF JUSTICE)*. Jurnal Esensi Hukum 2(2), 48-63.